

## Upaya Meningkatkan Implementasi SAK EMKM melalui Peran Akuntan Berpraktik

Raditya Shinta Hanifati<sup>1</sup>, Lianny Leo<sup>2</sup>

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia <sup>1</sup>

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia <sup>2</sup>

### Abstract

*Many MSMEs in Indonesia have not been able to provide financial reports according to standards. Meanwhile, professional accountants in Indonesia have not been able to provide adequate assistance related to understanding accounting. This study aims to evaluate the suitability of the SAK EMKM implementation and explain the contribution of accountants in creating optimal SAK EMKM implementation. This study uses a case study approach with mixed methods. Data analysis uses content analysis, thematic analysis, and constant comparative analysis. The unit of analysis of this study is accounting service firms (KJA) in Depok. The results of this study found that there were several evaluations related to the basic concept of SAK EMKM, namely the absence of the application of the concept of business entities and the consistency of the presentation of financial statements. In addition, the implementation of SAK EMKM so far can only be carried out by medium entities. These conditions encourage KJA to contribute more than just providing financial report preparation services, namely through supervision efforts, free consulting services, and provide an understanding of accounting concepts. These efforts are carried out to educate MSME actors so that the SAK EMKM can be implemented optimally.*

**Keywords.** *implementation, SAK EMKM, registered accounting practitioner, professional assistance.*

### Abstrak

Banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum mampu menyediakan laporan keuangan sesuai standar. Sementara itu, akuntan profesional di Indonesia belum dapat memberikan pendampingan yang memadai terkait pemahaman akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi SAK EMKM dan menjelaskan kontribusi akuntan berpraktik dalam mengoptimalkan implementasi SAK EMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode campuran. Analisa data menggunakan analisa konten, analisa tematik, dan analisa konstan komparatif. Unit analisa penelitian ini adalah KJA di Depok. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa evaluasi yang berkaitan dengan konsep dasar SAK EMKM yaitu belum adanya penerapan konsep entitas bisnis dan konsistensi penyajian laporan keuangan. Selain itu, implementasi SAK EMKM sejauh ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha menengah. Kondisi-kondisi tersebut mendorong KJA untuk memberikan kontribusi yang lebih dari sekedar pemberian jasa penyusunan laporan keuangan yaitu melalui upaya supervisi, pelayanan konsultasi gratis, dan memberikan pemahaman konsep akuntansi. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengedukasi pelaku UMKM sehingga SAK EMKM sebagai pedoman standar pelaporan bagi UMKM dapat diimplementasikan secara optimal.

**Kata kunci.** implementasi, SAK EMKM, akuntan berpraktik, pendampingan profesional.

**Corresponding author.** raditya.shinta71@ui.ac.id, radityashinta@gmail.com

**How to cite this article.** Hanifati, R. S., & Leo, L. (2019). Upaya Meningkatkan Implementasi SAK EMKM melalui Peran Akuntan Berpraktik. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 65–80. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/17002>

**History of article. Received:** Februari 2019, **Revision:** Mei 2019, **Published :** Juli 2019

## PENDAHULUAN

Saat ini, populasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih didominasi oleh usaha mikro yaitu 98.70% dan sisanya usaha kecil dan menengah (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2017). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pelaku usaha kecil dan usaha menengah yang memiliki jumlah aset dan omset yang besar masih sangat rendah. Kemampuan teknis serta sulitnya akses ke pembiayaan menjadi hambatan UMKM dalam mengembangkan kapasitas dan skala bisnisnya. Mayoritas pelaku UMKM masih memiliki kendala dalam mempersiapkan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan kredit yaitu salah satunya laporan keuangan yang *bankable* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2016). Dalam memenuhi kebutuhan penyusunan laporan keuangan UMKM, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengeluarkan standar pelaporan yang lebih sederhana bagi UMKM yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM dinilai mampu untuk membantu UMKM mencapai literasi keuangan dan mengoptimalkan kinerjanya khususnya dalam hal mencari pendanaan. Namun, implementasi SAK EMKM masih menjadi pekerjaan yang tidak mudah di kalangan UMKM. Masih banyak pelaku UMKM yang belum sadar akan pentingnya pencatatan keuangan dan pembukuan yang baik (Kompas.com, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2018) menunjukkan bahwa hanya 34% pelaku UMKM yang telah mampu menyediakan laporan keuangan sesuai SAK dan sebanyak 74% pelaku UMKM belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang SAK EMKM.

Namun demikian, kendala tersebut telah dapat dimitigasi oleh hadirnya tenaga akuntan profesional dan kantor jasa akuntan (KJA) yang telah diformalkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 25/PMK.01/2014

dan PMK No. 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister. Oleh karena itu, tenaga akuntan berpraktik berpeluang besar dalam membantu UMKM mempersiapkan laporan keuangan yang kredibel dan sesuai standar. Sayangnya, peran akuntan profesional Indonesia dinilai masih belum optimal di kalangan pelaku UMKM terutama dalam hal pemahaman tentang pentingnya laporan keuangan bagi perkembangan bisnis. Penelitian yang dilakukan oleh (ASEAN Federation of Accountants, 2018) menyatakan bahwa pendampingan yang diberikan akuntan profesional terhadap UMKM di Indonesia kurang memadai dan terbatas pada kepatuhan teknis. Pendekatan pemerintah Indonesia kepada UMKM lebih banyak berfokus kepada penerimaan pajak. Pelaku UMKM berpendapat bahwa pelatihan akuntansi yang disediakan tidak mengatasi tantangan langsung sehari-hari yang dihadapi oleh para UMKM sehingga bukan kebutuhan yang diprioritaskan.

Fenomena ini terjadi di Indonesia, salah satunya di Kota Depok. Berdasarkan data (Pemerintah Kota Depok, 2018), terdapat 1.650 unit UMKM yang terdaftar di Depok. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan sejauh ini berupa pelatihan laik sehat, pelatihan teknopreneur, pelatihan akses permodalan, dan pelatihan manajemen pelayanan. Pelatihan akuntansi belum menjadi program DUKM Kota Depok kepada para UMKM. Terlebih lagi, jumlah KJA yang terdaftar di Depok masih tergolong sedikit di wilayah Jawa Barat yaitu sebanyak 6 kantor dengan total jumlah UMKM yang menjadi klien mereka sebanyak 38 unit usaha. Data tersebut menunjukkan bahwa hanya 2% pelaku UMKM di Depok yang menggunakan jasa akuntan untuk membantu penyusunan laporan keuangan usahanya.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang sebelumnya dilakukan oleh (ASEAN Federation of Accountants, 2018). Salah satu keterbatasan penelitian tersebut

yaitu pemahaman dan pembahasan isu mengenai implementasi SAK bagi UMKM dalam konteks regional masih belum dapat dijelaskan secara komprehensif. Penelitian ini akan mengevaluasi kesesuaian SAK EMKM berdasarkan kondisi UMKM serta mengeksplorasi keterlibatan akuntan berpraktik melalui KJA dalam meningkatkan implementasi SAK EMKM.

Masalah dalam penelitian ini adalah SAK EMKM belum dapat difahami dan diimplementasikan secara optimal oleh kalangan UMKM di mana masih 34% pelaku UMKM yang telah mampu menyediakan laporan keuangan sesuai SAK (Putra, 2018). Banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum memahami pentingnya pembukuan dan pencatatan keuangan yang rapi dan rutin. (Kompas.com, 2018). Kendala tersebut seharusnya dapat dimitigasi oleh hadirnya KJA. Namun, KJA maupun akuntan profesional di Indonesia belum dapat memberikan pendampingan yang memadai terkait pemahaman akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian (ASEAN Federation of Accountants, 2018). Sebagai konsultan bisnis yang paling diminati oleh UMKM, kontribusi akuntan profesional berperan penting dalam terciptanya implementasi SAK EMKM yang optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi SAK EMKM dan bagaimana akuntan profesional berkontribusi dalam mengoptimalkan implementasi SAK EMKM pada UMKM. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kesesuaian implementasi SAK EMKM jika dikaitkan dengan kondisi UMKM saat ini?
- b. Bagaimana kontribusi akuntan berpraktik dalam upaya meningkatkan implementasi SAK EMKM?

Kontribusi penelitian ini adalah mengevaluasi kesesuaian proses implementasi SAK EMKM oleh pelaku UMKM dan kontribusi akuntan profesional dalam menciptakan implementasi SAK EMKM yang optimal, sehingga dapat

memberikan informasi tambahan kepada akuntan profesional khususnya KJA dan IAI dalam upaya mengoptimalkan implementasi SAK EMKM.

## KAJIAN PUSTAKA

Teori *resource-base* (*resource-base theory*) mulai berkembang sejak tahun 1959 yang dilatarbelakangi oleh pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana kemampuan sumber daya dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan (Penrose dalam (Barney & Clark, 2007). Konsep ini kemudian dielaborasi oleh (Barney, 1991) dengan menambahkan karakteristik sumber daya perusahaan yang dapat menghasilkan keunggulan bersaing diantaranya dapat memberikan nilai tambah, sulit untuk ditiru, jarang dijumpai, dan tidak dapat digantikan.

Salah satu sumberdaya yang dimaksud dalam teori ini adalah sumber daya manusia yang dapat menyediakan keahlian spesifik karena dapat memberikan nilai lebih kepada perusahaan. Pentingnya keahlian spesifik membuat perusahaan harus memilih dua alternatif penyediaan sumber daya yaitu melalui *outsourcing* atas keahlian yang dibutuhkan atau melalui aktivitas pelatihan dan pengembangan internal. Di sisi lain, perusahaan dituntut untuk tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat yang dihasilkan dalam aspek keunggulan bersaing (Barney & Clark, 2007).

Banyak UMKM yang tidak memiliki karyawan dengan latar belakang pendidikan yang spesifik seperti akuntansi, sehingga diperlukan suatu pertimbangan penyediaan sumber daya eksternal melalui *outsourcing* untuk memenuhi kebutuhan atas keahlian spesifik (Barbera & Hasso, 2013). Penelitian-penelitian terdahulu telah mengembangkan hubungan teori ini dengan peran akuntan eksternal yang sangat berpotensi dalam membantu pengusaha kecil dan menengah melalui keahlian spesifik terkait akuntansi dan manajemen keuangan untuk meningkatkan produktivitas bisnis (Blackburn, Carey, & Tanewski, 2010; Oosthuizen, 2018).

Di Indonesia, ketentuan hukum bagi UMKM diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. UMKM merupakan usaha

produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria masing-masing sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria UMKM

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
<b>Kekayaan bersih</b>	< = Rp 50.000.000	Rp 50.000.000 - Rp 500.000.000	> Rp 500.000.000 - Rp 10.000.000.000
<b>Hasil penjualan tahunan</b>	< = Rp 300.000.000	Rp 300.000.000 = Rp 2.500.000.000	> Rp 2.500.000.000 - Rp 50.000.000.000
<b>Jumlah karyawan/pekerja</b>	1 - 4 orang	5 - 19 orang	20 - 99 orang

Sumber: data diolah, UU No. 20 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008)

Saat ini, komposisi pelaku UMKM di Indonesia sebesar 98,7% masih didominasi oleh usaha mikro sektor informal yang memiliki keterbatasan sumber daya. Penelitian terdahulu menemukan kendala yang dihadapi UMKM diantaranya kurang pengetahuan akan pengelolaan bisnis, keterbatasan modal, kurang penguasaan terhadap regulasi perpajakan, hingga tidak adanya pencatatan keuangan secara rutin (ASEAN Federation of Accountants, 2018; Banham & He, 2014; Barbera & Hasso, 2013; Oosthuizen, 2018; Susyanti, 2014). Hal ini menunjukkan UMKM masih perlu difasilitasi dengan pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti KJA.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (International Federation of Accountants, 2016) menyatakan KJA sebagai *small and medium practices* menjadi jasa konsultasi dan penyedia informasi keuangan yang paling diminati oleh *small and medium enterprise (SMEs)*. Penelitian yang dilakukan oleh (Banham & He, 2014) menemukan bahwa permintaan jasa akuntan terbesar dari sektor UMKM diantaranya jasa pelaporan pajak tahunan, jasa penyusunan laporan keuangan tahunan, jasa *advisory*, jasa pendukung akuntansi, dan jasa konsultasi perpajakan.

Di Indonesia, keberadaan KJA baru disahkan dan diformalkan pada tahun 2014 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 25/PMK.01/2014.

Berdasarkan peraturan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014), KJA hanya diperbolehkan memberikan jasa akuntansi selain asuransi. Jumlah KJA yang saat ini telah terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencapai 451 kantor dengan 19.805 orang akuntan beregister. Klien yang berpotensi sebagai ladang pendapatan KJA terbesar berasal dari UMKM yang mencapai hampir 66 juta unit jika dibandingkan dengan kelompok usaha lainnya seperti BUMN/BUMD, lembaga pemerintah, dan perusahaan terdaftar. KJA diharapkan dapat menjadi pusat pengetahuan terkait literasi akuntansi bagi UMKM, khususnya dalam hal penyusunan laporan keuangan (Ranti, 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (ASEAN Federation of Accountants, 2018) menyatakan bahwa pendampingan yang diberikan akuntan profesional terhadap UMKM di Indonesia kurang memadai dan sebagian besar terbatas pada kepatuhan teknis. Upaya untuk mengadopsi sistem pelaporan UMKM di Indonesia terbatas pada kewajiban terhadap regulator khususnya perbankan/kreditor sehingga peran akuntan lebih berfokus kepada pengawasan. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM di Indonesia melakukan penyediaan laporan keuangan semata-mata hanya untuk pemenuhan regulasi. Dalam hal penyediaan sistem pelaporan keuangan bagi UMKM, DSAK IAI telah mengeluarkan SAK EMKM yang disusun khusus berdasarkan kebutuhan

UMKM dan mempermudah UMKM dalam melakukan transisi pelaporan keuangan berdasar kas ke dasar akrual, menggunakan dasar pengukuran biaya historis, dan tidak memberlakukan penurunan nilai kecuali ada regulasi khusus (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Namun, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putra, 2018) menemukan hanya 34% pelaku UMKM yang telah mampu menyediakan laporan keuangan sesuai SAK EMKM yang terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumberdaya untuk memahami pelaporan keuangan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *single case study*. Studi kasus adalah penelitian yang menyelidiki suatu fenomena secara detail serta mendalam berdasarkan kenyataan yang ada (Yin, 2009). Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu metode penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menganalisa data (Denzin dalam (Shauki, 2018)). Dalam pendekatan ini, desain penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, sedangkan analisa data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif.

Objek dalam penelitian ini yaitu KJA yang berlokasi di Kota Depok sebanyak 6 kantor. Daftar KJA didapatkan dari data resmi yang dirilis oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan RI. Media komunikasi awal yang digunakan untuk menghubungi KJA adalah melalui email dan telepon. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data-data hasil wawancara dari narasumber penelitian ini. Wawancara digunakan sebagai instrumen dalam mengumpulkan data. (Warren, 2001) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk menggali informasi dan ide melalui pertanyaan-pertanyaan dan jawaban. Wawancara

digunakan untuk menggali fenomena lebih dalam mengenai permasalahan penelitian melalui narasumber yang berkaitan langsung dengan fenomena tersebut. Penelitian ini memiliki beberapa kelompok narasumber wawancara yaitu pimpinan KJA di Depok dan pelaku UMKM yang menjadi klien dari KJA tersebut.

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa konten, analisa tematik, dan analisa konstan komparatif dengan menggunakan software NVivo 12 Pro. Analisa konten adalah teknik analisa untuk menyusun suatu kesimpulan yang valid dari teks (Krippendorff, 2004). Analisa konten pada penelitian ini dilakukan dengan mencari topik-topik yang paling diusung oleh seluruh kelompok narasumber. Analisa tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan menyajikan detail informasi dari suatu topik (Braun & Clarke, 2006). Analisa tematik dilakukan dengan menjabarkan detail informasi yang diperoleh dari setiap narasumber terkait topik-topik yang diidentifikasi pada analisa konten. Selanjutnya, analisa konstan komparatif akan dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari topik yang diusung antar kelompok narasumber (Boeije, 2002). Unit analisa dalam penelitian ini merupakan *single unit analysis* yaitu KJA di Depok. Kota Depok hanya memiliki 6 KJA terdaftar, sedangkan jumlah UMKM yang berpotensi menjadi klien mereka yaitu sebanyak 1.650 unit usaha. Mengingat keterbatasan waktu, penelitian ini hanya dapat memperoleh data dari 4 KJA.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini disusun untuk menjelaskan hasil temuan dan diskusi mengenai permasalahan penelitian yaitu belum optimalnya implementasi SAK EMKM dan belum memadainya peran akuntan profesional terhadap UMKM di Indonesia. Hasil temuan diperoleh melalui instrumen wawancara dengan beberapa kelompok narasumber yaitu pimpinan KJA dan pelaku UMKM. Unit analisa penelitian ini adalah KJA di

Kota Depok berjumlah 4 kantor. Wawancara dilakukan dengan beberapa tahap, dimulai dari pimpinan KJA kemudian pelaku UMKM yang menjadi klien KJA tersebut.

### Wawancara kepada Pimpinan KJA

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pimpinan KJA berkaitan dengan jasa

yang diberikan kepada klien, implementasi SAK EMKM, pendampingan teknis terhadap klien, dan perkembangan serta kendala KJA saat ini. Berikut ini merupakan profil dari kelompok narasumber pimpinan KJA.

Tabel 2. Profil Narasumber KJA

Keterangan	Narasumber A1	Narasumber A2	Narasumber A3	Narasumber A4
Nama KJA	KJA A	KJA B	KJA C	KJA D
Jabatan	Pimpinan	Pimpinan	Pimpinan	Pimpinan
Tahun terdaftar	2017	2017	2018	2016
Badan hukum	Perseorangan	Perseorangan	Perseorangan	Perseorangan
Jasa yang diberikan	Jasa pembukuan, jasa perpajakan, jasa sistem informasi akuntansi	Jasa pembukuan, jasa manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati	Jasa pelaporan keuangan, jasa konsultasi perpajakan, jasa sistem informasi akuntansi	Jasa pembukuan, jasa reviu laporan keuangan, jasa sistem informasi akuntansi, jasa perpajakan,
Jumlah klien UMKM	6	4	8	20
Range omzet tahunan klien	3 – 5 Miliar	2 – 4 Miliar	5 – 10 Miliar	4 – 9 Miliar

Sumber: Hasil wawancara, 2019

Berdasarkan hasil analisa konten menggunakan fitur *word frequency* pada software NVivo 12 Pro, didapatkan *word cloud* sebagai berikut:



Topik-topik yang paling diusung oleh kelompok narasumber ini berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, pencatatan akuntansi, pendampingan akuntan, implementasi hingga regulasi. Berdasarkan analisa tematik, informasi yang diberikan terkait masing-masing topik dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Analisa Tematik Narasumber KJA

Tema	Narasumber A1	Narasumber A2	Narasumber A3	Narasumber A4
<b>Evaluasi implementasi SAK EMKM</b>	Belum memisahkan transaksi bisnis dengan transaksi pribadi	Pencatatan sederhana yang tidak kontinu	Kendala menjabarkan pos-pos keuangan yang detail	Kesalahan penyajian akibat minimnya pemahaman akuntansi
<b>Pendampingan KJA kepada UMKM</b>	Memberikan pemahaman konsep akuntansi	Memberikan supervisi melalui revidu dan koreksi	Memberikan sesi konsultasi dan pemahaman konsep akuntansi	Memberikan pelatihan software akuntansi
<b>Regulasi terkait KJA</b>	Penegasan regulasi terkait perbedaan jasa KJA, KAP dan KKP	Kebutuhan terhadap regulasi dengan ruang lingkup lebih luas	Penegasan regulasi terkait perbedaan jasa KJA, KAP dan KKP	Kebutuhan terhadap regulasi dengan ruang lingkup lebih luas

Sumber: Hasil wawancara, 2019

### Evaluasi Implementasi SAK EMKM

Kesesuaian Asumsi Dasar SAK EMKM dengan Kondisi UMKM

Berdasarkan Bab 2 SAK EMKM, asumsi dasar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan meliputi dasar akrual, kelangsungan usaha, dan konsep entitas bisnis. Konsep entitas bisnis menjelaskan bahwa transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan secara jelas dengan transaksi pemilik bisnis maupun transaksi entitas lainnya. (Narasumber A1, 2019) mengatakan bahwa terdapat kasus yang ditemui pada kliennya terkait konsep tersebut di mana pemilik UMKM melakukan pembayaran atas pengeluaran atau biaya pribadinya dengan menggunakan kas perusahaannya. Mayoritas pelaku usaha yang masih pemula dengan skala bisnis yang kecil belum mengerti akan konsep pemisahan harta ini. Padahal, pendapatan dan biaya yang tidak berhubungan dengan operasional bisnis tidak bisa diakui secara komersial maupun fiskal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM khususnya usaha mikro masih

memiliki kendala atau kesulitan dalam mengimplementasikan konsep entitas bisnis.

### Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan

Bab 3 SAK EMKM menjelaskan bahwa penyajian wajar, frekuensi pelaporan, dan penyajian yang konsisten menjadi ketentuan yang harus dipenuhi ketika entitas menyajikan laporan keuangan. Penyajian wajar laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyajikan informasi yang relevan, representatif, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Frekuensi pelaporan entitas wajib dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan dengan lengkap. Penyajian yang konsisten mengharuskan entitas melakukan penyusunan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode secara konsisten.

(Narasumber A1, 2019) mengatakan bahwa pada awalnya klien-klien UMKM menggunakan jasa KJA untuk penyusunan laporan keuangan ketika ada intensi-intensi formal tertentu yang mensyaratkan lampiran laporan keuangan bisnisnya. Diluar itu, para UMKM tersebut menyusun laporan keuangan secara sederhana hanya untuk

keperluan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan PP 23/2018 yaitu sebesar 0,5% dari omzet. Sebagian besar pelaku UMKM khususnya usaha mikro dan kecil belum memiliki inisiatif untuk menyusun laporan keuangan secara rutin dan sukarela.

Menurut (Narasumber A2, 2019), pencatatan keuangan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebatas rekap pendapatan dan pengeluaran harian yang sifatnya tidak kontinu atau berkelanjutan. Kemudian, (Narasumber A3, 2019) menyinggung aspek penjabaran pos-pos laporan keuangan yang detail sebagai salah satu hambatan pelaku usaha mikro dan kecil dalam menerapkan SAK EMKM karena keterbatasan kondisi dan pengetahuan akuntansi yang dimiliki. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap konsep akuntansi berkontribusi terhadap ketidakwajaran informasi yang terdapat pada laporan keuangan sebagaimana dikatakan oleh (Narasumber A4, 2019):

*“Contoh kasusnya pernah ada klien saya yang tidak memperhitungkan laba akumulatif tahun sebelumnya untuk mencari angka saldo laba tahun ini, sehingga hanya laba tahun berjalan saja yang disajikan.. kan itu salah.. ”*

#### Keterjangkauan Ruang Lingkup SAK EMKM

Menurut ruang lingkungannya, SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah sebagaimana klasifikasi yang diatur dalam UU. Namun, implementasi SAK EMKM sejauh ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha menengah. Hal ini dibuktikan oleh data profil KJA pada Tabel 4.2 yang menunjukkan bahwa seluruh klien KJA termasuk dalam kategori usaha menengah dgn omzet tahunan diatas 3 miliar rupiah. Menurut (Narasumber A1, 2019), SAK EMKM belum bisa dikatakan sesuai dan aplikatif pada kondisi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki keterikatan

terhadap suatu regulasi. Hal ini dikarenakan penerapan SAK EMKM membutuhkan biaya yang besar sehingga menyusun laporan keuangan sesuai standar melalui jasa akuntan maupun KJA bukanlah prioritas bagi kelangsungan usaha mereka.

#### **Pendampingan KJA kepada UMKM terkait Implementasi SAK EMKM**

##### Pendampingan Formal

Pendampingan secara formal adalah pendampingan yang dilakukan berdasarkan kontrak perikatan yang mengakibatkan adanya hubungan sebagai penerima jasa (klien) dan pemberi jasa dalam suatu termin waktu dan biaya tertentu. Seluruh KJA yang menjadi unit analisa melakukan pendampingan formal terkait implementasi SAK EMKM melalui pemberian jasa pembukuan, jasa penyusunan laporan keuangan, jasa sistem informasi akuntansi, dan jasa supervisi. Pemanfaatan jasa tersebut dilakukan dengan jenis kontrak bulanan (temporer) dan tahunan. (Narasumber A2, 2019) menyatakan bahwa jasa supervisi diberikan untuk klien yang telah menggunakan perangkat lunak akuntansi seperti MYOB/Accurate yang dioperasikan oleh staf akuntansi internal. Permintaan klien terhadap jasa ini dilakukan ketika pengetahuan dan kompetensi staf internal terkait penerapan SAK yang dimiliki masih belum memadai. KJA bertugas mereview dan mengoreksi jika ada jurnal penyesuaian terkait pos-pos tertentu yang harus dicatat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan SAK.

Berdasarkan pengalaman narasumber lain, pendampingan yang dilakukan bisa lebih efektif jika KJA tidak hanya sebatas pemberian jasa tetapi juga memberikan sesi konsultasi dan pelatihan terkait pemahaman konsep akuntansi untuk komponen laporan keuangan tertentu. Hal ini memberikan dampak positif bagi klien karena dapat



meningkatkan pemahaman mengenai perlakuan akuntansi suatu transaksi bisnis, serta selanjutnya dapat melakukan pembukuan secara mandiri sebagaimana dikatakan oleh (Narasumber A3, 2019):

*“Ada inisiatif dari mereka untuk tahu lebih dalam, kenapa sih kas kecil harus ada? Apa sih maksudnya biaya dibayar dimuka? Mereka ingin tahu. Waktu itu ada klien saya yang tanya masalah pembayaran gaji, gaji untuk bulan ini tapi pembayarannya masih di bulan depan, itu bagaimana pencatatannya Pak? Seperti itu ya saya jelaskan teknis pencatatannya bagaimana..”*

(Narasumber A3, 2019)

### Pendampingan Informal

Pendampingan secara informal dilakukan ketika tidak ada keterikatan melalui kontrak dengan hanya pendekatan edukasi secara personal. (Narasumber A2, 2019) menjelaskan pendampingan yang dilakukan lebih mengarah pada edukasi sederhana kepada para pengusaha kecil yang ditemui. Misalnya, memberikan pengetahuan akan pentingnya pencatatan keuangan yang rutin dan berkelanjutan untuk usaha tersebut. Menurut (Narasumber A3, 2019), pentingnya kesadaran untuk berkontribusi lebih tanpa melihat *fee* menjadi motivasi dari seorang akuntan untuk membagi ilmu akuntansi yang dimiliki secara cuma-cuma. Ia beberapa kali memberikan konsultasi-konsultasi gratis kepada klien ataupun kerabat tanpa terikat kontrak karena adanya hubungan baik yang terjalin. Konsultasi gratis yang diberikan meliputi cara memahami laporan keuangan, cara menghitung profitabilitas usaha hingga aspek perpajakan dari suatu transaksi bisnis.

### Kondisi dan Kebutuhan KJA untuk Mendukung Implementasi SAK EMKM

Saat ini, perkembangan KJA yang jumlahnya semakin bertambah dari tahun ke tahun belum diimbangi dengan peningkatan *brand awareness* di kalangan masyarakat.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh beberapa narasumber penelitian:

*“KJA saat ini belum seberapa berkembang ya karena masih baru kan di dunia bisnis. Banyak KJA yang berdiri tapi tidak punya klien.”*

(Narasumber A1, 2019)

*“KJA ini tumpul, belum bisa berkembang. Belum ada nilainya, lebih kepada hubungan antara klien dengan KJA nya sendiri. Ada temen-temen di KJA lain, masih banyak juga yang belum dapat klien.”*

(Narasumber A4, 2019)

Selain itu, perbedaan KJA dan kantor konsultan lain seperti Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Kantor Konsultan Pajak (KKP) terkait jasa yang ditawarkan juga masih menjadi suatu pertanyaan bagi pelaku UMKM dikarenakan adanya jasa-jasa serupa yang juga ditawarkan di kantor konsultan lain sebagaimana dikatakan oleh (Narasumber A1, 2019) dan (Narasumber A3, 2019):

*“Mereka kadang bertanya apa bedanya KAP sama KJA, kalau KAP kan bisa memberikan opini audit, kalau KJA kelebihannya apa? Intinya masih banyak masyarakat yang bingung membedakan.”*

(Narasumber A1, 2019)

Mengatasi masalah-masalah tersebut, (Narasumber A2, 2019) menjelaskan bahwa sudah terdapat upaya yang telah dilakukan KJA untuk meningkatkan *brand awareness* dan memperkenalkan KJA kepada masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi ke beberapa institusi dan ruang publik seperti BUMD, universitas, hingga pusat perbelanjaan. Namun, belum ada sosialisasi yang khusus ditujukan kepada pelaku UMKM.

### Keterbatasan Regulasi KJA

Ketentuan hukum terkait KJA sejauh ini hanya diatur oleh PMK No. 25/PMK.01/2014 dan PMK No. 216/PMK.01/2017. Menurut (Narasumber A2, 2019), potensi pemanfaatan jasa KJA oleh UMKM berasal dari kebutuhan bisnis

yang mensyaratkan lampiran laporan keuangan seperti pengajuan pinjaman perbankan, pelaporan perpajakan, permintaan rekan bisnis, dan sebagainya. Oleh karena itu, beberapa narasumber mengatakan bahwa KJA membutuhkan regulasi lain yang bersifat memaksa dan ruang lingkupnya lebih luas sehingga diharapkan kesadaran pelaku usaha akan manfaat yang bisa diperoleh dari KJA dapat lebih tinggi.

Regulasi tersebut dapat diupayakan dengan mengikutsertakan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penambahan kalimat klausul yang dikaitkan dengan KJA dalam Peraturan OJK (POJK). Dengan begitu, implementasi SAK EMKM juga dapat lebih efektif dengan adanya keterikatan regulasi yang mendorong

permintaan akan laporan keuangan yang kredibel di kalangan pelaku UMKM sebagaimana dikatakan oleh (Narasumber A4, 2019):

“... misalkan, setiap entitas yang akan melapor SPT Badan harus dilampiri laporan keuangan yang sudah direview oleh akuntan beregister atau KJA. Baru disitu UMKM akan datang mencari KJA, kita pun akan berkembang.”

#### Wawancara kepada Pelaku UMKM

Pelaku UMKM yang menjadi narasumber penelitian merupakan klien-klien dari masing-masing KJA. Berikut ini merupakan data-data UMKM yang dapat diperoleh.

Tabel 4. Profil Narasumber UMKM

Keterangan	Narasumber B1	Narasumber B2
Jenis industri UMKM	Biro perjalanan haji & umroh	Jasa ekspedisi/pengiriman
Jabatan	Staf keuangan	Staf keuangan
Latar belakang pendidikan	S1 Komputer	S1 Pertanian
Kepemilikan usaha	Keluarga	Perseorangan
Jumlah omzet per tahun	8 – 9 Miliar	4,8 - 6 Miliar
Klasifikasi usaha	Usaha menengah	Usaha menengah

Sumber: Hasil wawancara, 2019

Berdasarkan hasil analisa konten menggunakan fitur *word frequency* pada software NVivo 12 Pro, topik-topik yang paling diusung oleh kelompok narasumber ini berkaitan dengan jasa penyusunan

laporan keuangan, pendampingan akuntan, dan pemahaman akuntansi. Berdasarkan analisa tematik, informasi yang diberikan terkait masing-masing topik dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Analisa Tematik Berdasarkan Narasumber UMKM

Tema	Narasumber B1	Narasumber B2
<b>Motivasi menggunakan jasa</b>	Perizinan usaha yang mensyaratkan laporan keuangan	Pelaporan SPT Tahunan yang mensyaratkan laporan keuangan tahunan
<b>Dampak pendampingan KJA</b>	Peningkatan kompetensi karyawan melalui pemahaman konsep akuntansi	Proses kinerja yang lebih efisien melalui pelatihan software akuntansi
<b>Pemahaman SAK EMKM</b>	Pemahaman spesifik terkait pencatatan akuntansi atas transaksi-transaksi bisnis	Sebatas melakukan rekap pemasukan dan pengeluaran, belum memahami pencatatan akuntansi sesuai standar

Sumber: Hasil wawancara, 2019

### Motivasi Menggunakan Jasa KJA

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan UMKM terhadap jasa KJA dilatarbelakangi oleh tuntutan regulasi diantaranya pelaporan SPT Badan Tahunan, perizinan usaha yang mensyaratkan surat keterangan fiskal hingga permintaan rekan bisnis. Regulasi-regulasi tersebut mensyaratkan adanya laporan keuangan yang kredibel dan sesuai standar, sementara para pemilik UMKM tidak memiliki karyawan dengan keahlian spesifik di bidang akuntansi. Adanya *gap* antara keterbatasan keahlian spesifik dan pemenuhan regulasi inilah yang berusaha diatasi oleh UMKM dengan memanfaatkan jasa akuntan melalui KJA.

### Dampak Pendampingan KJA terhadap Pemahaman Laporan Keuangan berbasis SAK EMKM

Beberapa narasumber menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan KJA dilakukan melalui pelatihan sistem aplikasi akuntansi, pemahaman konsep akuntansi dan pelayanan konsultasi. Namun demikian, para narasumber memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda mengenai laporan keuangan. (Narasumber B1, 2019) mendapatkan pendampingan yang baik dan efektif dari KJA untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep akuntansi secara spesifik sebagaimana dikatakan berikut ini:

*“...kita diberi pemahaman dulu konsepnya gimana, kemudian tetap melayani gitu kalau kami konsultasi untuk pencatatan transaksi-transaksi yang luar biasa. Kalau misalnya ada yang salah pos, itu juga kami dikasih tahu revisinya, banyak dibimbing lah. Ya totalitas lah pokoknya beliau..”*

(Narasumber B2, 2019) menjelaskan bahwa pemahaman akuntansi yang dimiliki sebatas pencatatan kas masuk dan kas keluar bulanan melalui dokumentasi nota penjualan

dan pengeluaran perusahaan. Rekap penjualan dan pengeluaran tersebut diberikan kepada KJA untuk dibukukan menjadi laporan keuangan. Dalam kasus ini, narasumber tersebut mengaku belum memahami pencatatan akuntansi maupun pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar karena seluruh proses pelaporan keuangan dilakukan oleh KJA.

Pada kasus lain, (Narasumber B1, 2019) juga memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai pemahamannya terhadap komponen laporan keuangan termasuk bagaimana perlakuan akuntansi untuk tiap-tiap transaksi bisnis yang terjadi. Narasumber tersebut menjelaskan adanya suatu kesalahan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaannya yaitu masih menggunakan rekening pribadi pemilik untuk melakukan transaksi penerimaan pendapatan usaha dalam situasi tertentu. Atas dasar kepercayaan, transaksi tersebut tidak dicatat sebagai aktiva perusahaan, namun dicatat secara terpisah sebagai kas dalam rekening pemilik diluar buku perusahaan. Diluar itu, pencatatan yang dilakukan sudah menggunakan dasar akrual khususnya terkait piutang penjualan dan utang gaji karyawan. Pemahaman tersebut didapatkan dari penjelasan konsep dan pendampingan teknis yang diberikan oleh KJA sebagaimana dikatakan berikut ini:

*“... contohnya jika ada booking slot umroh yang masuk, perlakuan awalnya kan dicatat sebagai piutang. Terus misalnya kalau ada pembayaran, nanti kita jurnal lagi kas masuknya dan mengurangi saldo piutang. Kemudian untuk perlakuan fee agen kita, nanti yang saya catat sebagai pendapatan perusahaan itu jumlah harga net kami kepada agen. Untuk fee mereka, saya catat dulu sebagai utang. Awalnya saya diajari oleh Pak X..”*

(Narasumber B1, 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas, pemahaman staf keuangan UMKM mengenai penjurnalan dan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM dapat

diwujudkan ketika KJA memberikan pendampingan melalui pemahaman mendetail atas konsep akuntansi sebagaimana dialami (Narasumber B1, 2019). Namun, kedua narasumber mengaku

bahwa selama ini mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang SAK EMKM dari pemerintah maupun lembaga profesional terkait.

Tabel 6. Analisa Komparatif antar Kelompok Narasumber

Pertanyaan Penelitian	Pimpinan KJA	Pelaku UMKM
<b>Evaluasi pemahaman dan implementasi SAK EMKM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendala penerapan konsep entitas bisnis dan konsistensi penyajian pelaporan keuangan</li> <li>• Implementasi SAK EMKM hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendala penerapan pemisahan harta</li> <li>• Keterbatasan pemahaman pencatatan akuntansi</li> </ul>
<b>Kontribusi KJA untuk meningkatkan implementasi SAK EMKM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya supervisi yang diberikan melalui revidi dan koreksi jurnal</li> <li>• Sesi konsultasi dan pemahaman konsep akuntansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman konsep akuntansi lebih komprehensif</li> </ul>

Sumber: Hasil wawancara, 2019

Berdasarkan hasil temuan yang sudah dijabarkan di atas, didapatkan hasil analisa komparatif antar kelompok narasumber yang menjawab pertanyaan penelitian yang disajikan pada tabel 6.

### **Evaluasi Implementasi SAK EMKM Berdasarkan Kondisi Bisnis UMKM**

Berdasarkan analisa komparatif atas respon para kelompok narasumber, terdapat beberapa temuan yang berkaitan dengan asumsi dasar SAK EMKM. Pertama, UMKM masih memiliki kendala pada penerapan konsep entitas bisnis khususnya pengakuan pendapatan dan beban. Informasi yang diperoleh dari (Narasumber A1, 2019) yaitu masih terdapat klien yang melakukan pembayaran untuk keperluan pribadinya menggunakan kas perusahaannya dan mencatatnya pada buku kas perusahaan. (Narasumber B2, 2019) memperkuat fakta tersebut dengan menjelaskan bahwa perusahaannya masih menggunakan rekening pribadi pemilik untuk melakukan transaksi penerimaan pendapatan usaha umroh dalam situasi tertentu.

Kedua, UMKM masih belum konsisten dalam menyajikan laporan keuangan serta

merutinkan frekuensi pelaporan. Menurut para narasumber, pelaku UMKM khususnya usaha mikro dan kecil belum memiliki inisiatif untuk menyusun laporan keuangan secara rutin dan sukarela. Pencatatan keuangan yang dilakukan sebatas rekap pendapatan dan pengeluaran harian yang sifatnya tidak kontinu atau berkelanjutan. Selain itu, penjabaran pos-pos laporan keuangan yang detail juga merupakan salah satu hambatan pelaku usaha mikro dan kecil dalam menyajikan informasi keuangan. Temuan lainnya adalah minimnya pemahaman UMKM terhadap konsep akuntansi dapat berkontribusi terhadap ketidakwajaran informasi yang terdapat pada laporan keuangan.

Ketiga, implementasi SAK EMKM sejauh ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha menengah. Hal ini dibuktikan oleh data profil KJA pada Tabel 2.1 yang menunjukkan bahwa seluruh klien KJA termasuk dalam kategori usaha menengah dengan omzet tahunan diatas 3 miliar rupiah. Menurut (Narasumber A1, 2019), SAK EMKM belum bisa dikatakan sesuai dan aplikatif pada kondisi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki keterikatan terhadap suatu regulasi. Tingginya biaya jasa akuntan dan keterbatasan pola pikir terkait

pentingnya informasi keuangan menjadi faktor penghambat implementasi SAK EMKM pada pelaku usaha tersebut.

Temuan tersebut sejalan dengan *teori resource-base* yang dinyatakan oleh (Barney, 1991) bahwa sumberdaya yang dapat memberikan nilai tambah akan menghasilkan keunggulan bersaing bagi perusahaan, dengan catatan tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat. Dalam hal ini, KJA dapat memberikan kontribusi kepada pelaku usaha menengah yang menjadi kliennya melalui evaluasi terhadap pencatatan akuntansi yang ideal berdasarkan konsep SAK EMKM. Dengan adanya evaluasi tersebut, pelaku UMKM khususnya usaha menengah dapat memperoleh wawasan yang lebih luas terkait pencatatan akuntansi yang baik dan benar, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

### **Kontribusi KJA dalam Meningkatkan Implementasi SAK EMKM**

Berdasarkan hasil wawancara kepada pimpinan KJA dan pelaku UMKM, beberapa KJA melakukan suatu pendampingan yang lebih dari sekedar pemberian jasa penyusunan laporan keuangan yaitu melalui upaya supervise, konsultasi, dan pemahaman konsep akuntansi. Pendampingan ini dilakukan sebagai upaya perbaikan dari evaluasi implementasi yang dialami oleh pelaku UMKM sebagaimana dijabarkan sebelumnya.

Dari sisi KJA, upaya supervisi yang diberikan melalui revidi dan koreksi jurnal sehingga SAK EMKM dapat diimplementasikan secara optimal. Selain itu, pendampingan melalui sesi konsultasi dan pemahaman konsep akuntansi dasar serta komponen laporan keuangan tertentu dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan implementasi SAK EMKM. Kesadaran berkontribusi lebih tanpa melihat fee menjadi motivasi tersendiri untuk membagi ilmu akuntansi yang dimiliki secara cuma-cuma. Hal ini memberikan dampak positif bagi

klien karena dapat meningkatkan pemahaman mengenai perlakuan akuntansi suatu transaksi bisnis, hingga selanjutnya dapat melakukan pembukuan secara mandiri sesuai SAK EMKM. Dari sisi pelaku UMKM, penjelasan salah satu narasumber mengkonfirmasi bahwa pendampingan KJA berkontribusi pada peningkatan kompetensi secara individu terkait pemahaman konsep akuntansi secara spesifik dan penyusunan laporan keuangan yang disyaratkan oleh SAK EMKM. Namun demikian, kontribusi KJA membutuhkan regulasi lain yang bersifat memaksa dan memiliki ruang lingkup yang lebih luas sehingga diharapkan kesadaran pelaku usaha akan manfaat yang bisa diperoleh dari KJA dapat lebih tinggi. Dengan begitu, implementasi SAK EMKM juga dapat lebih efektif dengan adanya keterikatan regulasi yang mendorong permintaan akan laporan keuangan yang kredibel di kalangan pelaku UMKM.

Hal ini dapat dijelaskan dengan *teori resource base* yang dikemukakan oleh (Barney & Clark, 2007) bahwa sumberdaya manusia yang dapat menyediakan keahlian spesifik dapat memberikan nilai lebih kepada perusahaan. Dalam hal ini, KJA sebagai penyedia tenaga akuntan profesional dapat menjadi sumberdaya UMKM untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya yang semakin berkembang khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang kredibel dan sesuai SAK EMKM. KJA juga dapat berperan sebagai mentor UMKM yang memberikan pelatihan dan pendampingan terkait pelaporan keuangan sehingga dapat menciptakan implementasi SAK EMKM yang optimal.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini meringkas hasil penelitian yang telah dijabarkan pada hasil dan pembahasan. Masalah dalam penelitian ini adalah KJA maupun akuntan berpraktik di Indonesia belum dapat memberikan kontribusi yang memadai terkait pemahaman akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian (ASEAN Federation of Accountants, 2018). Hal ini berdampak pada

implementasi SAK EMKM yang belum optimal di kalangan UMKM di mana hanya 34% pelaku UMKM yang telah mampu menyediakan laporan keuangan sesuai SAK (Putra, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi SAK EMKM dan bagaimana akuntan berpraktik berkontribusi dalam mengoptimalkan implementasi SAK EMKM pada UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa evaluasi yang berkaitan dengan asumsi dasar SAK EMKM. Pertama, UMKM masih memiliki kendala pada penerapan konsep entitas bisnis khususnya pengakuan pendapatan dan beban. Kedua, UMKM masih belum konsisten dalam menyajikan laporan keuangan serta merutinkan frekuensi pelaporan. Ketiga, implementasi SAK EMKM sejauh ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha menengah. Kondisi-kondisi tersebut mendorong beberapa KJA untuk memberikan kontribusi yang lebih dari sekedar pemberian jasa penyusunan laporan keuangan yaitu melalui upaya supervisi, pelayanan konsultasi gratis, dan pemahaman konsep akuntansi. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memberikan edukasi kepada UMKM sehingga SAK EMKM dapat diimplementasikan secara optimal. Namun begitu, KJA masih membutuhkan dukungan dari pemerintah maupun regulator melalui sosialisasi dan juga regulasi-regulasi yang lebih mengikat sehingga KJA dapat memperluas ruang geraknya untuk berkontribusi kepada pelaku UMKM khususnya dalam menyediakan laporan keuangan yang kredibel.

Dalam penyusunannya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya waktu, wilayah geografis, dan ukuran unit analisa. Keterbatasan waktu penelitian berdampak pada kelengkapan informasi dan data yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup wilayah Depok dengan 6 KJA terdaftar dari 451 KJA yang terdaftar di Indonesia. Data dan informasi yang

dihasilkan juga terbatas pada pelaku UMKM yang menjadi klien dari KJA tersebut.

Penelitian ini merespon keterbatasan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (ASEAN Federation of Accountants, 2018). Salah satu keterbatasan penelitian tersebut yaitu pemahaman dan pembahasan isu mengenai implementasi SAK bagi UMKM dalam konteks regional masih belum dapat dijelaskan secara komprehensif. Penelitian ini dapat memberikan evaluasi lebih mendalam terhadap kesesuaian SAK EMKM berdasarkan kondisi UMKM serta memberikan informasi tambahan mengenai kontribusi akuntan berpraktik dalam meningkatkan implementasi SAK EMKM. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah geografis dan ukuran unit analisa sehingga dapat lebih merepresentasikan fenomena penerapan SAK EMKM yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini hanya mengeksplorasi fenomena dari sisi akuntan berpraktik dan pengguna jasanya yaitu UMKM, sehingga informasi yang didapatkan terbatas pada evaluasi dari sudut pandang pengguna SAK. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggali fenomena yang terjadi dari sisi regulator dan pemerintah yang juga penting dalam mendukung implementasi SAK EMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Federation of Accountants. (2018). *The Institutional Environment for Small and Medium Enterprises ( SMEs ) and Roles for the Accounting Profession ASEAN PERSPECTIVES*. *Www.Aseanaccountants.Org*.
- Banham, H., & He, Y. (2014). Exploring The Relationship Between Accounting Professionals And Small And Medium Enterprises (SMEs). *Journal of Business & Economics Research (JBER)*, 12(3), 209. <https://doi.org/10.19030/jber.v12i3.8723>

- Barbera, F., & Hasso, T. (2013). Do We Need to Use an Accountant? The Sales Growth and Survival Benefits to Family SMEs. *Family Business Review*, 26 (3)(September), 271–292. <https://doi.org/10.1177/0894486513487198>
- Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17, 99–120.
- Barney, J. B., & Clark, D. N. (2007). *Resource-Based Theory: Creating Sustaining and Competitive Advantage*. OXFORD University Press.
- Blackburn, R., Carey, P., & Tanewski, G. A. (2010). *The Role of Trust, Relationships and Professional Ethics in the Supply of External Business Advice by Accountants to SMEs*.
- Boeije, H. (2002). A Purposeful Approach to the Constant Comparative Method in the Analysis of Qualitative Interviews. *Quality & Quantity*, (Kluwer Academic Publishers), 391–409.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3, 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- International Federation of Accountants. (2016). *THE ROLE OF SMPS IN PROVIDING BUSINESS SUPPORT TO SMES New Evidence*. International Federation of Accountants.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 25/PMK.01/2014, 1–36.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2016). *Rencana Strategis 2015-2019*. Retrieved from <https://www.ekon.go.id/publikasi/download/2053/1497/renstra-d1-2015-2019.pdf>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2017). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2016-2017*. Retrieved from [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1549946778\\_UMKM\\_2016-2017\\_rev.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1549946778_UMKM_2016-2017_rev.pdf)
- Kompas.com. (2018). Masih Banyak Pelaku UMKM Buta Akuntansi. Retrieved February 26, 2019, from <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/30/144531526/masih-banyak-pelaku-umkm-buta-akuntansi>
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications (Vol. 2). <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.31.3460>
- Oosthuizen, A. (2018). Predicting the benefits that small business owners obtain from their accounting practitioners. *Doctoral Dissertation*, (July).
- Pemerintah Kota Depok. (2018). Hingga 2018, DKUM Sudah Berikan Pelatihan bagi 545 Pelaku UMKM di Depok. Retrieved from <https://www.depok.go.id/21/05/2018/01-berita-depok/hingga-2018-dkum-sudah-berikan-pelatihan-bagi-545-pelaku-umkm-di-depok>
- Putra, Y. M. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Pada Umkm Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Profita*, 11(2), 201.

<https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.004>

- Ranti, F. (2017). Pengenalan Kompartemen Kantor Jasa Akuntansi. *Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *UU No. 20 Tahun 2008*, (1), 1–31.
- Shauki, E. R. (2018). Research Instruments in Case Study and the Role of Researcher. *Handout, Case Writing & Methodology, ECAM 809303 University of Indonesia*.
- Susyanti, J. (2014). Model Pendampingan Bisnis Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata secara Integratif. *Seminar Nasional Riset Inovatif II*, 656–662.
- Warren, C. A. B. (2001). Qualitative Interviewing In: *Handbook of Interview Research*, 83–102. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4135/9781412973588>
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications (Vol. 4). <https://doi.org/10.1016/j.jada.2010.09.005>